

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa (Muhammad, 2014:6). Menurut Kasmir, Lembaga keuangan bank adalah setiap perusahaan keuangan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Soemitra,2009:28). Sedangkan lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan

dana (Muhammad, 2014:4). Sehingga perbankan syariah merupakan *alternative* bagi umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, agar terhindar dari praktik bunga.

Perbankan syariah menurut jenisnya perbankan syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah (Soemitra,2009:106). Kedudukan perbankan syariah lebih kuat setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia sampai tahun 2016 dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010-2016

Kelompok Bank	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah	11	11	11	11	12	12	12
Unit Usaha Syariah	23	24	24	23	22	22	22
BPRS	150	155	158	160	163	163	165

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Tahun 2010-2013 terdapat 11 bank umum syariah, sedangkan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan menjadi 12 bank umum syariah dan stabil sampai tahun 2016. Namun, pada unit usaha

syariah mengalami gejolak, pada tahun 2010 terdapat 23 unit usaha syariah dan pada tahun 2011-2012 naik menjadi 24 unit usaha syariah, sedangkan pada tahun 2013 turun menjadi 23 unit usaha syariah dan di tahun 2014-2016 menjadi 22 unit usaha syariah. Hal ini berbanding terbalik dengan bank pembiayaan rakyat syariah, setiap tahunnya mengalami peningkatan.

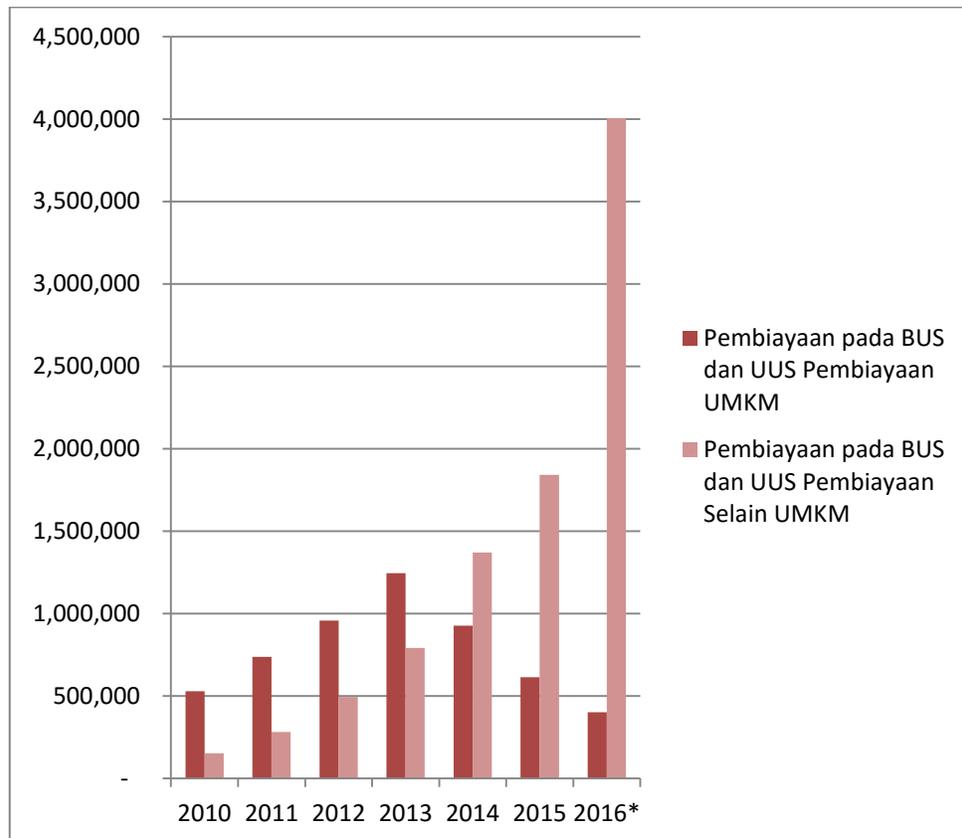
Persaingan perbankan syariah di Indonesia semakin ketat, sehingga diharapkan setiap bank meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dalam menarik investor dan nasabah. Salah satu indikator untuk melihat kinerja keuangan bank adalah dengan melihat seberapa besar bank tersebut menyalurkan dananya kembali kemasyarakat, karena keuntungan bank terbesar terletak dari seberapa besar bank menyalurkan dananya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Perbankan syariah merupakan salah satu bank yang mengalokasikan dana pembiayaannya untuk UM KM. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki berbagai lapisan usaha baik lingkup usaha mikro kecil, maupun lingkup menengah. Hal ini menjadi peluang bagus untuk perbankan syariah di Indonesia. Apabila alokasi pembiayaan tersalurkan pada sektor yang tepat maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia khususnya lingkup ekonomi mikro kecil menengah. Dibawah ini merupakan perkembangan alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di

Indonesia, berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Grafik 1.1

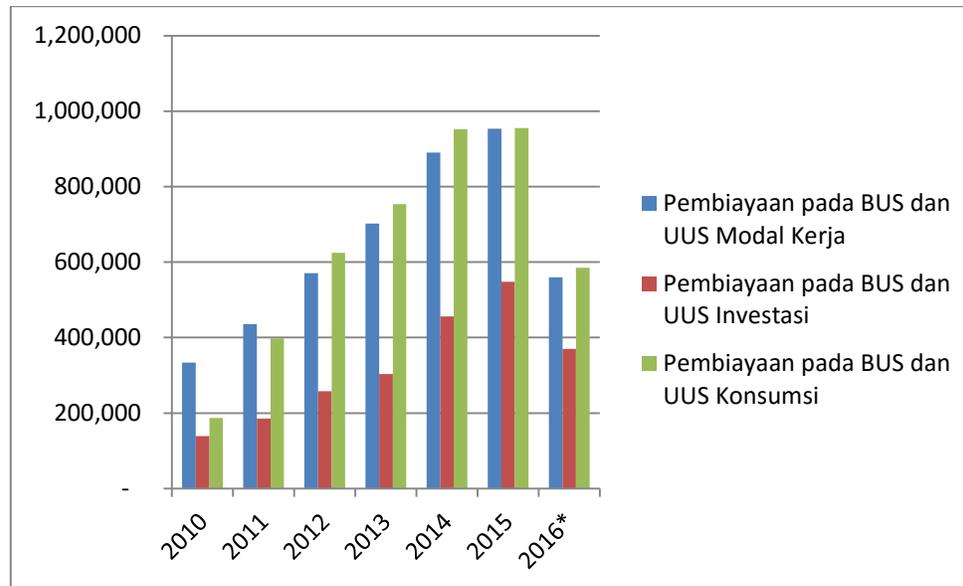
Perkembangan Alokasi Pembiayaan UMKM pada BUS, UUS di
Indonesia Tahun 2010-2016 (Rp.Miliar)



Sumber : www.ojk.go.id ;*sampai Juli

Grafik 1.2

Perkembangan Alokasi Pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi pada BUS, UUS di Indonesia, Tahun 2010-2016 (Rp.Miliar)



Sumber : www.ojk.go.id ;*sampai Juli

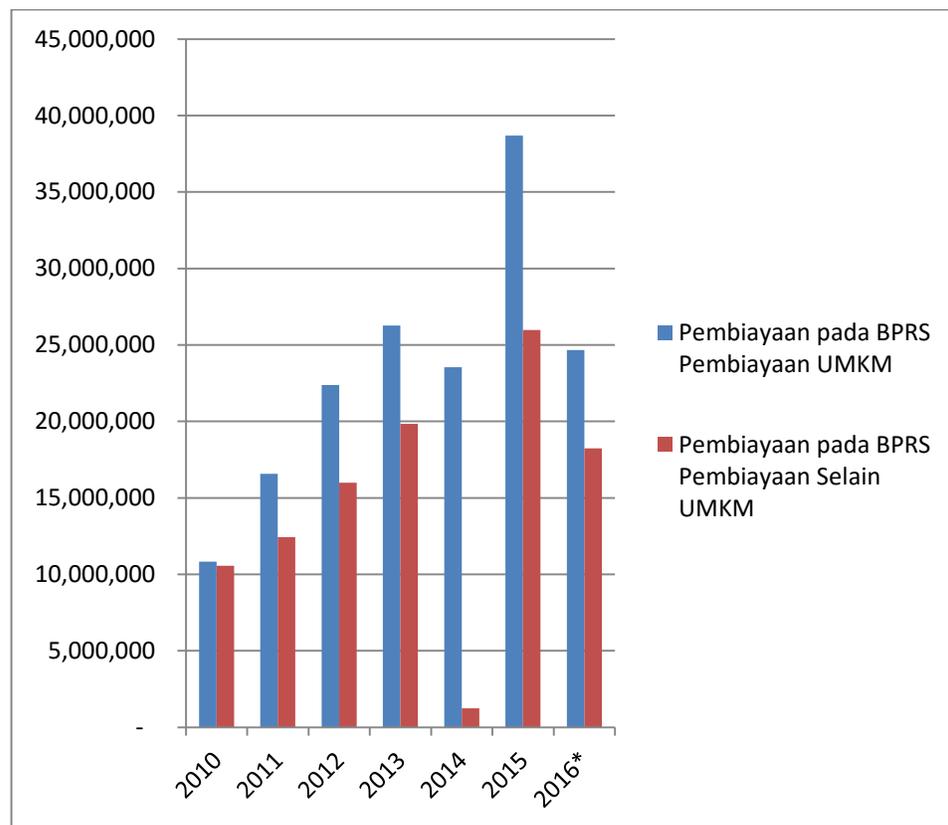
Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2014-2016 di dominasi oleh pembiayaan selain sektor UMKM. Tingginya alokasi selain sektor UMKM menunjukkan bahwa susahnya masyarakat atau pengusaha sektor UMKM dalam mendapatkan modal usaha di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2010-2016 jumlah alokasi pembiayaan pada Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didominasi oleh jenis penggunaan konsumsi dibandingkan modal kerja dan investasi.

Grafik 1.3

Perkembangan Alokasi Pembiayaan UMKM pada BPRS di Indonesia,

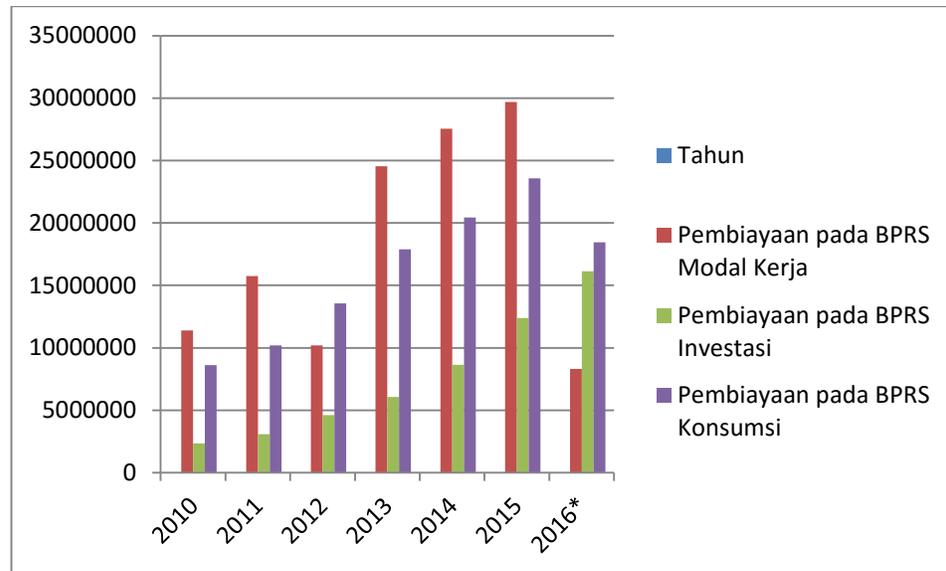
Tahun 2010-2016 (Rp.Jutaan)



Sumber : www.ojk.go.id ;*sampai Juli

Grafik 4

Perkembangan Alokasi Pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi pada BPRS di Indonesia, Tahun 2010-2016 (Rp.Jutaan)



Sumber : www.ojk.go.id ;*sampai Juli

Berbanding terbalik dengan data statistik perbankan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Alokasi pembiayaan didominasi oleh pembiayaan dalam sektor UMKM. Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2010-2016 jumlah alokasi pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didominasi oleh jenis penggunaan untuk modal kerja.

Berdasarkan grafik diatas, terlihat gejolak dalam penyaluran dana sektor UMKM. Menurut Pratin dan Adnan (2005) terdapat dua faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk melihat kinerja yang dilakukan bank

dalam pembiayaan, maka dapat dilihat dari laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat rasio keuangan yang dapat mengindikasikan kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Termasuk kedalam faktor internal adalah efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen, posisi likuiditas, dan posisi risiko. Sedangkan faktor eksternal yaitu perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ekonomi dan keuangan.

Menurut Kurniawanti dan Zufikar (2014), salah satu indikator dari faktor internal yaitu dana pihak ketiga yang mewakili likuiditas bank. Dana pihak ketiga sumber likuiditas bank untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan bank. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratin dan Andan (2005) menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan.

Faktor internal lainnya yang diambil penulis adalah *Non Performing Financing* (NPF), merupakan salah satu rasio keuangan yang menjadi indikator untuk menilai kualitas aktiva bank syariah. Semakin tinggi rasio *Net Performing Financing* (NPF) menunjukkan kualitas

pembiayaan perbankan syariah semakin buruk. Sehingga pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan agar kualitas pembiayaan dan keuangan yang diperoleh bank semakin maksimal. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang melatar belakangi penelitian ini adalah Menurut Kurniawanti dan Zulfikar (2014), *Net Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan syariah.

Selain itu, penulis juga akan mengambil variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam penelitian ini. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai indikator permodalan. Kecukupan modal menjadi bagian yang sangat penting dalam perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu rasio keuangan, jika nilai CAR tinggi maka hal ini menunjukkan bank mampu membiayai kegiatan operasionalnya. Sehingga semakin tinggi CAR, maka bank dapat meyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Pratin dan Adnan (2005) menyatakan bahwa rasio CAR mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia, namun tidak signifikan.

Faktor eksternal yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat BI *Rate* di Indonesia. Kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh

perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Hardiyati (2012) menyatakan bahwa secara parsial BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel jumlah dana pihak ketiga (DPK), *Net Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai faktor internal serta variabel BI rate dan inflasi sebagai faktor eksternal. Sesuai dengan tujuan penulis maka variabel tersebut digunakan untuk melihat apakah faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mengambil penelitian dengan judul **“Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan UMKM pada Perbankan Islam di Indonesia (Periode Tahun 2010-2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh secara parsial variabel jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI rate* terhadap alokasi pembiayaan UMKM antara Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode tahun 2010-2016?
2. Adakah pengaruh secara simultan variabel jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI rate* terhadap alokasi pembiayaan UMKM antara Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode tahun 2010-2016?
3. Adakah perbedaan pengaruh variabel jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI rate* terhadap alokasi pembiayaan UMKM antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode tahun 2010-2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate* terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode tahun 2010-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate* terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode tahun 2010-2016.
3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh variabel jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI rate* terhadap alokasi pembiayaan UMKM antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode tahun 2010-2016.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumber informasi dan referensi perbankan syariah dalam menentukan kebijakan dan inovasi produk baru khususnya pada alokasi pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan syariah. Selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pengusaha mikro dalam memilih perbankan syariah.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi dan tambahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas alokasi pembiayaan UMKM yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan dibandingkan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada periode tahun 2010 - 2016, sehingga objek yang diambil penulis adalah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia pada periode tahun 2010-2016.

2. Dalam penelitian ini dibatasi pada faktor internal yang akan diambil adalah jumlah dana pihak ketiga, *Net Performing Finance* (NPF) , dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan faktor eksternal yang diambil adalah *BI rate* sebagai variabel independen, yang berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu alokasi pembiayaan UMKM antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing- masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori dan hipotesa penelitian yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel penelitian, hasil penelitian maupun buku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi: (1) hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

(2) Pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, sarana-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.